



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

**Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Lamongan**

T A H U N 2019 (TRIBULAN I)



DASAR HUKUM SAKIP

1

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

2

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

3

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku)

5

Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6

Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP

7

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411)



“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

M
I
S
I

1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

2.

Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah

3.

Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan menjaga Kelestarian Lingkungan

4.

Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Bagian Adm.
Pembangunan

5.

Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tenram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal



Keselarasn RPJMD vs Renstra

RPJMD

VISI Kab.Lamongan:

“Terwujudnya Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

MISI 4: MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN :
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

RENSTRA

TUJUAN : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

Indikator Tujuan : Nilai LPPD; Nilai SAKIP; IKM

SASARAN : Terwujudnya kebijakan strategis bidang ekonomi pembangunan

Indikator sasaran : Prosentase kebijakan strategis bidang ekbang yang ditindaklanjuti



Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan



TUGAS & FUNGSI

melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

T U G A S





TUGAS DAN FUNGSI.....

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan





PROSES BISNIS URUSAN

A
D
M

P
E
M
B
A
N
G
U
N
A
N

- REGULASI
- DANA
- SDM
- IT
- MITRA KERJA

P
E
N
G
E
N
D
A
L
I
A
N

Prosentase
Kebijakan Strategis
Bidang Adm
Pembangunan Yang
Ditindaklanjuti

Pelaksana
Kebijakan :
OPD dan
stakeholders

INPUT

PROSES

OUTPUT/
OUTCOME

CUSTOMER



PROSES BISNIS INTI

Terwujudnya Pembangunan Yang Berkualitas dan Sesuai Perencanaan

Level 0

Perumusan Kebijakan Strategis yang ditindaklanjuti dalam Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pembangunan

Level I

Fasilitasi dan Koordinasi bidang administrasi pembangunan

Level II

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan Kapasitas Pengelola Pembangunan

Penyusunan Program administrasi Pembangunan

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan



Cascading.....

Indikator Tujuan

Tujuan :

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Indikator :

Nilai LPPD
Nilai SAKIP
IKM

Indikator Sasaran

Sasaran :

Terwujudnya kebijakan strategis bidang ekonomi pembangunan

Indikator :

Persentase kebijakan strategis bidang ekbang yang ditindaklanjuti

Program

Program :

Fasilitasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator :

Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi

Kegiatan

- 1.Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah. **Indikator :** Jumlah Pembinaan
- 2.Pembinaan Jakon. **Indikator:** Jumlah pembinaan SDM
- 3.Pengendalian Pembangunan Daerah. **Indikator :** Jumlah keg fisik yg tepat waktu dan sesuai perencanaan
- 4.Monev pelaporan pembangunan daerah. **Indikator :** Jumlah laporan realisasi keu yg dievaluasi dan dimonitoring
- 5.Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik, **Indikator :** Jumlah Layanan publikasi kpd masyarakat
- 6.LPSE. **Indikator :** Jumlah layanan PBJ utk SPSE

Anggaran

Rp. 240 jt

Rp. 191 jt

Rp. 340 jt

Rp. 245 jt

Rp. 99 jt

Rp. 495 jt

Eselon
2

Eselon
3

Eselon
4

Σ : Rp. 1.610.000.000



KESELARASAN RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN
TAHUN 2016-2021

- Visi** : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
Tujuan : **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik**
Sasaran 2 : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan.

No	Indikator Sasaran/Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Prosentase kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Jml kebijakan strategis bid. Ekonomi Pembangunan yg ditindaklanjuti x 100% Jml kebijakan strategis yg diusulkan	Laporan Bagian di lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Asisten Ekonomi dan Pembangunan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Thn. Dasar 2016	2017	2018	2019	2020	2021	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik	1. Terwujudnya kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan (Sasaran lingkup Asisten Ekhang)	Prosentase kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 1. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Sumber Daya Alam yang dievaluasi 2. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi yang dievaluasi 3. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Koperasi yang dievaluasi 4. Prosentase pelaksanaan barang/jasa melalui LPSE 5. Prosentase kegiatan yang dikendalikan dan dievaluasi 6. Tera realisasinya rencana yang baik (pelaksanaan penyusunan SOP bagi Pemasda)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan yang berkualitas 1. Fasilitas dan koordinasi kebijakan strat perkonominan daerah 2. Fasilitas dan koordinasi kebijakan stratik & evaluasi pembangunan daerah 3. Fasilitas dan koordinasi kebijakan strate kerjasama daerah & pengembangan BUM	

RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terwujudnya pembangunan berkualitas dan sesuai perencanaan	Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3 T (tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku/Administrasi)	Persentase Kegiatan Yang dikendalikan dan dievaluasi	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Penyusunan Sistem informasi terhadap Layanan Publik Pengendalian Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE)	Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan) Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan) Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan dimonitoring Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE	165.000.000,00 165.000.000,00 50.000.000,00 259.350.000,00 300.550.000,00 530.100.000,00

KESELARASAN RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

BAGIAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pembangunan Yang Berkwalitas dan sesuai perencanaan	Persentase kegiatan yang dikendalikan dan dievaluasi sebagai bahan rumusan kebijakan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.610.000.000,00	APBD

Lamongan, 23 Januari 2019

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

PIHAK KESATU
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA
KABUPATEN LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA
Pembina Utama Madya
NIP. 19680112 198603 1 001

EDY YUNAN ACHMADI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19801027 199912 1 001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO DPA OPD						FORMULIR DPA-OPD 2.2.1
	4.01.03	4.01.03.01	23	003	5	2	
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN							
TAHUN ANGGARAN 2019							
Urusan Pemerintah	: 4.01.03 - Sekretariat Daerah						
Organisasi	: 4.01.03.01 - Sekretariat Daerah						
Kegiatan	: 4.01.03.01.23 - Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
Kegiatan	: 4.01.03.01.23.003 - Pengendalian Pembangunan Daerah						
Lokasi	: Setda Kab. Lamongan (Bagian Administrasi Pembangunan)						
Sumber Dana	: Dana Daerah						
Indikator	: Persentase Kegiatan yang dikendalikan dan dievaluasi						Target Kinerja
Capaian Program	: Proporsitas Kegiatan yang dikendalikan dan dievaluasi						100%
Masukan	: Dana yang dikeluarkan						340.000.000
Keluaran	: Jumlah Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan perencanaan						1200 Kegiatan
Hasil	: Proporsitas Kebijakan Strategis Bidang Ekbang yang ditindaklanjuti						75 OPD
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah							
Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5		
5	BELANJA DAERAH				340.000.000,00		
5 2	BELANJA LANGSUNG				340.000.000,00		
5 2 1	Belanja Pegawai				69.000.000,00		
5 2 1 01	Honorarium PNS				63.600.000,00		
5 2 1 01 001	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				17.100.000,00		
	pengarah 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan	6	OB	500.000,00	3.000.000,00		
	Penanggung jawab 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan	6	OB	400.000,00	2.400.000,00		
	Kordinator 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan	6	OB	375.000,00	2.250.000,00		
	Ketua 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan	6	OB	350.000,00	2.100.000,00		
	Sekretaris 200 jt s/d 1M 1 Orang x 6 Bulan	6	OB	325.000,00	1.950.000,00		
	Anggota 200 jt s/d 1M 3 Orang x 6 Bulan	18	OB	300.000,00	5.400.000,00		
5 2 1 01 002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				300.000,00		
	pejabat Pengadaan barang dan jasa s/d 300 juta 3 Orang x 1 Paket	4	OP	300.000,00	1.200.000,00		
5 2 1 01 003	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan				1.200.000,00		
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai s/d. Rp100 juta 1 Orang x 4 Paket	4	OP	300.000,00	1.200.000,00		
5 2 1 01 005	Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan				45.000.000,00		
	- Administrator RF 75 Orang x 6 Bulan	450	OB	100.000,00	45.000.000,00		
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				5.400.000,00		
5 2 1 02 001	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				5.400.000,00		
	Anggota 200 jt s/d 1M 3 Orang x 6 Bulan	18	OB	300.000,00	5.400.000,00		
	Belanja Barang Dan Jasa				271.000.000,00		



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
								Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3 T (tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku/Administrasi)	1	Persentase Kegiatan Yang dikendalikan dan dievaluasi	Jumlah Kegiatan Fisik Yang terselesaikan Tepat Waktu, Mutu Dan Buku/ Jumlah Kegiatan Fisik Keseluruhanx100%	%	100	100	100	1974/1977 *100%	99,85



RENCANA AKSI TAHUN 2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI
1	Terwujudnya pembangunan berkualitas dan sesuai perencanaan	Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3 T (tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku/Administrasi)	Persentase Kegiatan Yang dikendalikan dan dievaluasi	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan)	2 kali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan nama PPK, PPHP dan pejabat pengadaan seluruh OPD 2. Pembinaan PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP dan pengawas lapangan
						Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan)	2 kali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan penyedia jasa/rekanan se-kab Lamongan 2. Fasilitasi penyedia jasa 3. FGD antara KPA dengan rekanan



RENCANA AKSI TAHUN 2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI
						Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat	1 aplikasi	1 Fasilitasi OPD terkait RUP
									2 Update laporan realisasi fisik secara berkala
									3 Pemberian surat teguran bagi penyedia jasa yang menyalahi kontrak kerja
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan dimonitoring	75 OPD	1 Update laporan penyerapan anggaran secara berkala
									2 Penyusunan laporan TEPRA
						Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE)	Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE	75 OPD	1 Fasilitasi penyedia jasa
									2 Perubahan pembentukan tim LPSE
									3 Studi banding LPSE



RENCANA REVIEW RENSTRA

Tabel Penggabungan Kegiatan 2020

No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan pagu indikatif 2019	No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perubahan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Usulan Kebutuhan Pagu Indikatif 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% Kegiatan Yang dikendalikan dan Dievaluasi			Program Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah		% Kegiatan Yang dikendalikan dan Dievaluasi	
1	Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan	340.000.000	1	Pengendalian Pembangunan Daerah		Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan	350.000.000
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan dimonitoring	245.000.000	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase tersusunnya laporan tepat waktu	350.000.000
					Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik			
3	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan)	191.000.000	3	Pembinaan Jasa Konstruksi	Fasilitasi dan koordinasi bidang administrasi pembangunan	1. Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan)	450.000.000
4	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan)	240.000.000		Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan		2. Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan)	
5	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat	96.000.000	4		Fasilitasi penyusunan pedoman belanja daerah	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan belanja daerah	500.000.000
6	Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE)	Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE	495.000.000					
			1.610.000.000					1.650.000.000

Lamongan, 8 April 2019
 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

EDY YUNAN ACHMADI, S.STP, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19801027 199912 1 001



END OF SLIDE

